PENDIDIKAN GRATIS BERBASIS 5 PILAR MANAJEMEN MUTU TERPADU

Rusman Roni

Abstract

The article reports five important stages to be put into account, they are:1) educational input, 2)process, , 3) product.4) committment 5)organization. The problem is as follows: How are 1) educational input, 2)process, , 3) product.4) committment 5)organization managed at South-Sumatera?. Method utilized in this study is descriptive technique and by using snowball technique. This is a process of gathering data taken from news paper especially Sindo. This finding indicates that the cumpulsoryand free education driven from APBN(National budget planning) for primary school to yunior high school.whereas senior high school is funded by APBD(Regional budget planning). Another finding indicates that 20 private school ignored bos (operational system of education.

With regard to the problems, there are four main problems, they are:1) general and particular problems, 2) budgeting problem 3) political problems, organization problems, .

In relation to solution and suggestions, several ways to cope with those problems. They are: commitment, raising the fund for the students and other components of education such facilities, teachers training etc

Key words : commitment, input,process,product, organization

PENDAHULUAN

Berdasarkan makna literal , pendidikan adalah perubahan tingkahlaku dari belum dewasa menjadi dewasa atau matang serta bertangung jawab. Sementara tingkahlaku yang dimaksud adalah tIngkahlaku yang bersifat positif. Dalam konteks ini jika ada perubahan yang bersifat negatif misalnya pendidkan mencuri ini bukan dikatan pendidikan yang bertanggung jawab, karena memiliki resiko yaitu dipenjara. Jadi pendidkan yang bersifat negatif akan tidak membuat seseorang bertanggung jawab bahkan membuat sengsara keluarganya. Sedangkan mengajar adalah transfer of knowledge atau memindahkan ilmu saja tanpa menyinggung perubahan tingkahlaku kearah kedewasaan yang bertanggung jawab. Seiring dengan kebijakangubernur Provisinsi Sum-Sel.dan isi UUD 45. sebagai landasan mengangkat artikel: 1) UUD Negara RI 45, 2) PP RI no 47 2008 tentang wajib belajar, 3)PP RI no 48 2008 tentang pendanaan pendidikan, 4) Kebijakan gubernur Provinsi SUM-SEL tentang pendidikan gratis. Adapun tujuan artikel ini adalah untuk memaparkan 5 pilar kualitas terpadu yang intinya mengacu pda BSNP atau badan standar nasional pendidikan dan atau komitmen,pimpinan, organisasi , input dan outcome pendidikan. Konsep manajemen

[1] FKIP Universitas Tridinanti Palembang
Jalan Kapten Marzuki No.2446, Palembang, South Sumatra, Indonesia
Phones: (0711) 358566, (0711) 355961 Fax. (0711) 358566

peningkatan mutu berbasis sekolah ini ditulis dengan tujuan;

a) Mensosialisasikan konsep dasar 5 pilar manajemen mutu terpadu berbasis sekolah khususnya kepada masyarakat.
b) Memperoleh masukan agar konsep manajemen ini dapat. diimplentasikan dengan mudah dan sesuai dengan kondisi lingkungan Indonesia yang memiliki keragaman kultural, sosioekonomi masyarakat dan kompleksitas geografisnya.
c) Menambah wawasan pengetahuan masyarakat khususnya masyarakat sekolah dan individu yang peduli terhadap pendidikan, khususnya peningkatan mutu pendidikan.
d) Memotivasi masyarakat sekolah untuk terlibat dan berpikir mengenai, peningkatan mutu pendidikan/pada sekolah masing - masing.
e) Menggalang kesadaran masyarakat sekolah untuk ikut serta secara aktif dan dinamis dalam mensukseskan peningkatan mutu pendidikan.
f) Memotivasi timbulnya pemikiran - pemikiran baru dalam mensukseskan pembangunan pendidikan dari individu dan masyarakat sekolah yang berada di garis paling depan dalam proses pembangunan tersebut.,
g) Menggalang kesadaran bahwa peningkatan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab semua komponen masyarakat tataran sekolah,
h) Mempertajam wawasan bahwa mutu pendidikan pada tiap sekolah harus dirumuskan dengan jelas dan dengan target mutu yang harus dicapai setiap tahun. 5 tahun,dst,sehingga tercapai misi sekolah kedepan.

MASALAH

Masalah yang akan dibahas dalam artikel ini adalah untuk membahas tentang pendidikan gratis berbasis 5 pilar manajemen mutu terpadu yang meliputi : Bagaimana *input, proses, produk pendidikan* , komitment, dan organisasi sekolah gratis di Sum-Sel ?

Selanjutnya secara umum, mutu adalah “continuous improvement” atau peningkatan dan perbaikan secara terus menerus serta refleksi dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam **memuaskan kebutuhan stakeholders** yang diharapkan atau yang implisit oleh stakeholder atau seluruh pihak yang terkait. Dalam konteks pendidikan pengertian mutu mencakup ***input, proses, produk*** *pendidikan*. ***Input pendidikan a.l siswa, peralatan,uang dan pembelajar*** tentang pendidikan gratis berbasis 5 pilar manajemen mutu terpadu yang meliputi : *input, proses, dan outcome atau produk pendidikan* , komitment, organisasi [1)],: 1) quality first, 2) stakeholders-in,3) the next process is

our stakeholders,4) speak with data, 5) upstream management. adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud berupa sumberdaya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsunnya proses. *Input* sumber daya meliputi sumberdaya manusia (kepala sekolah, guru termasuk guru BP, karyawan, siswa) dan sumberdaya selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang, bahan, dsb.).

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan artikel ini adalah untuk membahas tentang pendidikan gratis berbasis 5 pilar manajemen mutu terpadu yang meliputi : sub tujuan untuk mengetahui *input, proses, produk pendidikan* , komitment, dan organisasi sekolah gratis di Sum-Sel. .

TINJAUAN PUSTAKA

Sekolah gratis

Konsep tentang sekolah gratis terutama dari sisi dana sekolah gratis,sebagaimana kita ketahui bahwa sekolah gratis artinya upaya sekolah untuk tidak membebani siswa sebagai input untuk mengikuti proses belajar dan mengajar pada sekolah tersebut.Sebagai tambahan sarana dan prasarana merupakan komponen pendidikan juga harus didukung oleh dana dari pemerintah. Selain itu biaya evaluasi juga sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah tanpa membebani pembelajar lagi. Sekolah gratis di Indonesia pada umumnya bersumber pada dana APBN yaitu dikenal dengan dan BOS (Dana bantuan operasional sekolah) dana bos ini diperuntukkan untuk jenjang SD sampai dengan SMP. Dana BOS untuk jenjang SMA/MA/SMK bersumber dari dana APBD. Besarnya dana BOS ini sangat ditentukan oleh jumlah siswa SD atau SMP. Yang bersangkutan. Namun ironisnya, ada 20 sekolah swasta yang menolak dana BOS dari pemerintah tersebut dengan alasan terlau repot untuk mengurus laporan pertanggung jawabannya lewat Departemen Pendidikan Nasional. Untuk tingkat SMP/SMPLuar biasa yang berada di wilayah kota Palembang sebesar Rp.400.000,-per/siswa,/tahun. Sedangkan dana Bos untuk triwukan sebesar Rp 100.000,- Sementara Utk SDSD Luar biasa di kabupaten sebesar Rp 397,000 persiswa/tahun atau Rp 99,259.00 persiswa /triwulan. Untuk tingkat SMP/SMPLuar biasa yang berada di wilayah kota Palembang sebesar Rp.575.000,-per/siswa,/tahun. Sedangkan dana Bos untuk triwukan sebesar Rp 143.000,- Sementara Untuk SMP/SMP Luar biasa di kabupaten sebesar Rp 570,000 persiswa/tahun atau Rp 142.500 persiswa /triwulan. (Seputar Indonesia: 14 Oktober 2009). Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumsel mengevaluasi

pelaksanaan sekolah gratis setelah efektif berlaku 1 Juli 2009. Dari evaluasi, ternyata program sekolah gratis masih banyak dikeluhkan penyelenggara pendidikan.

Kepala Disdik Provinsi sumsel Ade Karyana menilai keluhan sekolah gratis cukup wajar, mengingat pelaksanaan sekolah gratis baru berjalan tiga bulan. Dia juga memaklumi, setiap ada kebijakan baru di dunia pendidikan pasti menuai pro dan kontra, terutama dari penyelenggara pendidikan. “keluhan itu tentunya perlu dipahami Karen aitu menjadi masukkan kita untuk terus melakukan sosialisasi dan pembenahan,” beber Ade kepada SI kemarin.

Sejumlah keluhan yang datang, ujar dia, cukup beragam, mulai kekhawatiran biaya sekolah gratis bisa terputus, dana sekolah gratis tidak terpenuhi sehingga siswa masih tetap bayar, hingga kekhawatiran sekolah gratis bisa mengancam nasib guru karena gaji guru bisa dipotong. “sejumlah keluhan ini wajar dan dapat menjadi feedback buat kami. Kendati begitu, sosialisasi terus kami lakukan. Kalau ada persoalan, tentu kami pulihkan dan kami tetap komitmen pada amanah, untuk program akyat kami jalankan,” tutur ade serya mengatkan, evaluasi sekolah gratis sangat penting, untuk meningkatkan kualitas program sekolah gratis itu sendiri.

Dia menambahkan, persepsi masyakat kalau sekolah gratis tidak bayar sama sekali juga dinilai keliru. Sebab, masih ada sejumlah item sekolah gratis yang mesti dibayar dan hal itu sudah diuraikan kepada masyarakat, terutama penyelenggara pendidikan.“ kalau Selama ini pungutan diambil sekolah, sekarang diganti oleh pemerintah.itu saja bedanya,” tukas Ade. Ade memperkirakan, pro-kontra sekolah gratis bisa memakan waktu paling sediknya dua tahun kedepan. Untuk itulah, pihaknya terus memberikan pemahaman menyeluruh bagi penyelenggara pendidikan, terutam kepada orangtua murid. Dia menjelaskan, pada program sekolah gratis sudah jelas penganggarannya karena sifatnya permanent berdasarkan jumlah perkepala murid di suatu sekolah. Sekolahnya pun sudah jlas. Jadi, evaluasi yang dilakukan dinilai tidak banyak masalah karena berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi disdik sumsel sekaligus Ketua Pelaksana Program Sekolah Gratis widodo menyatakan, sejuh ini Badan Pengawas keuangan dan pembangunan sudah melakukan audit di sejumlah sekolah, termasuk menilai standar sekolah terhadap sekolah standar nasional (SSN), rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI), dan sekolah berstandar internasional (SBI).bahkan sesuai peraturan daerah dan peraturan gubernur, ternyata hanya

tiga sekolah/madrash yang boleh menarik pungutan lebih, yakni yang berstatus SSN, RSBI, SBI. Itu pun harus ada persetujuan tertulis dari bupati/walikota masing-masing daerah.

Adapun syarat bisa berstatus SSN, RSBI, dan SBI yakni sekolah tersebut harus terakreditasi A, kemudian harus memenuhi delapan standar nasional pendidikan, seperti dari tenaga pendidik, sarana prasarana, biaya dan sejumlah persyaratan lainnya.

“ Bagi yang tidak memenuhi syarat, tentu menjadi sekolah umum dan harus emnjalankan sekolah gratis, suatu hal yang wajar dan bisa diselesaikan secara bijak. Terpisah, anggota DPRD Sumsel Arudji Kartawinata menuturkan, meski baru berjlan tiga bulan, kemajuan sekolah gratis sudah dapat dirasakan manfaatnya. Untuk itu, evaluasi yang dilakukan harus dapat menyeluruh agar ditemukan solusi mengatsi maslah tersebut.

“ kalau bisa evaluasi sekolah gratis dilakukan setiap bulan, sehingga bisa diketahui tahapan demi tahapan, selain juga dapat mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan sekolah gratis, pungkas Arudji.

Kerangka kerja dalam manajemen peningkatan mutu terpadu berbasis sekolah. Dalam manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah ini diharapkan sekolah dapat bekerja dalam koridor - koridor tertentu antara lain sebagai berikut ;

1. **Sumber daya**

Sekolah harus mempunyai fleksibilitas dalam mengatur semua sumber daya sesuai dengan kebutuhan setempat. Selain pembiayaan operasional/administrasi, pengelolaan keuangan harus ditujukan untuk : 1) Memperkuat sekolah dalam menentukan dan mengalolasikan dana sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan untuk proses peningkatan mutu, 2). Pemisahan antara biaya yang bersifat akademis dari proses pengadaannya, dan 3) pengurangan kebutuhan birokrasi pusat.

2. **Pertanggung-jawaban (accountability);**

Sekolah dituntut untuk memiliki akuntabilitas baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Hal ini merupakan perpaduan antara komitment terhadap standar keberhasilan dan harapan/tuntutan orang tua/masyarakat. Pertanggung-jawaban (accountability) ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa dana masyarakat dipergunakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan jika mungkin untuk menyajikan informasi mengenai apa yang sudah dikerjakan. Untuk itu setiap sekolah harus memberikan laporan pertanggung-jawaban dan mengkomunikasikannya kepada orang tua/masyarakat dan

pemerintah, dan melaksanakan kaji ulang secara komprehensif terhadap pelaksanaan program prioritas sekolah dalam proses peningkatan mutu.

3. Kurikulum;

Berdasarkan kurikulum standar yang telah ditentukan secara nasional, sekolah bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum baik dari standar materi (content) dan proses penyampaiannya. Melalui penjelasan bahwa materi tersebut ada mafaat dan relevansinya terhadap siswa, sekolah harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan melibatkan semua indera dan lapisan otak serta menciptakan tantangan agar siswa tumbuh dan berkembang secara intelektual dengan menguasai ilmu pengetahuan, terampil, memilliki sikap arif dan bijaksana, karakter dan memiliki kematangan emosional. Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan ini yaitu;

1) Pengembangan kurikulum tersebut harus memenuhi kebutuhan siswa.
2) Bagaimana mengembangkan keterampilan pengelolaan untuk menyajikan kurikulum tersebut kepada siswa sedapat mungkin secara efektif dan efisien dengan memperhatikan sumber daya yang ada.
3) Pengembangan berbagai pendekatan yang mampu mengatur perubahan sebagai fenomena alamiah di sekolah.

Untuk melihat progres pencapaian kurikulum, siswa harus dinilai melalui proses test yang dibuat sesuai dengan standar nasional dan mencakup berbagai aspek kognitif, affektif dan psikomotor maupun aspek psikologi lainnya. Proses ini akan memberikan masukan ulang secara obyektif kepada orang tua mengenai anak mereka (siswa) dan kepada sekolah yang bersangkutan maupun sekolah lainnya mengenai performan sekolah sehubungan dengan proses peningkatan mutu pendidikan.

4. *Personil sekolah*

Sekolah bertanggung jawab dan terlibat dalam proses rekrutmen (dalam arti penentuan jenis guru yang diperlukan) dan pembinaan struktural staf sekolah (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru dan staf lainnya). Sementara itu pembinaan profesional dalam rangka pembangunan kapasitas/kemampuan kepala sekolah dan pembinaan keterampilan guru dalam pengimplementasian kurikulum termasuk staf kependidikan lainnya dilakukan secara terus menerus atas inisiatif sekolah. Untuk itu birokrasi di luar sekolah berperan untuk menyediakan wadah dan instrumen pendukung. Dalam

konteks ini pengembangan profesioanl harus menunjang peningkatan mutu dan pengharhaan terhadap prestasi perlu dikembangkan. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengkontrol sumber daya manusia, fleksibilitas dalam merespon kebutuhan masyarakat, misalnya pengangkatan tenaga honorer untuk keterampilan yang khas, atau muatan lokal. Demikian pula mengirim guru untuk berlatih di institusi yang dianggap tepat.

Jelaslah bahwa konsep manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah ini membawa isu desentralisasi dalam manajemen (pengelolaan) pendidikan dimana birokrasi pusat bukan lagi sebagai penentu semua kebijakan makro maupun mikro, tetapi hanya berperan sebagai penentu kebijakan makro, prioritas pembangunan, dan standar secara keseluruhan melalui sistem monitoring dan pengendalian mutu. Konsep ini sebenarnya lebih memfokuskan diri kepada tanggung jawab individu sekolah dan masyarakat pendukungnya untuk merancang mutu yang diinginkan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya, dan secara terus menerus mnyempurnakan dirinya. Semua upaya dalam pengimplementasian manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah ini harus berakhir kepada peningkatan mutu siswa (lulusan)[2)].

Sementara itu pendanaan walaupun dianggap penting dalam perspektif proses perencanaan dimana tujuan ditentukan, kebutuhan diindentifikasikan, kebijakan diformulasikan dan prioritas ditentukan, serta sumber daya dialokasikan, tetapi fokus perubahan kepada bentuk pengelolaan yang mengekspresikan diri secara benar kepada tujuan akhir yaitu mutu pendidikan dimana berbagai kebutuhan siswa untuk belajar terpenuhi. Untuk itu dengan memperhatikan kondisi geografik dan sosiekonomik masyarakat, maka sumber daya dialokasikan dan didistribusikan kepada sekolah dan pemanfaatannya dipercayakan kepada sekolah sesuai dengan perencanaan dan prioritas yang telah ditentukan oleh sekolah tersebut dan dengan dukungan masyarakat. Pedoman pelaksanaan peningkatan mutu kalaupun ada hanya bersifat umum yang memberikan rambu-rambu mengenai apa-apa yang boleh/tidak boleh dilakukan.

Secara singkat dapat ditegaskan bahwa akhir dari itu semua bermuara kepada mutu pendidikan. Oleh karena itu sekolah-sekolah harus berjuang untuk menjadi pusat mutu (center for excellence) dan ini mendorong masing-masing sekolah agar dapat menentukan visi dan misi nya untuk mempersiapkan dan memenuhi kebutuhan masa depan siswanya.

Perencanaan program sekolah ini harus mencakup indicator atau target

mutu apa yang akan dicapai dalam tahun tersebut sebagai proses peningkatan mutu pendidikan (misalnya kenaikan NEM rata-rata dalam prosentase tertentu, perolehan prestasi dalam bidang keterampilan, olah raga, dsb). Program sekolah yang disusun bersama-sama antara sekolah, orang tua dan masyarakat ini sifatnya unik dan dimungkinkan berbeda antara satu sekolah dan sekolah lainnya sesuai dengan pelayanan mereka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Karena fokus kita dalam mengimplementasian konsep manajemen ini adalah mutu siswa, maka program yang disusun harus mendukung pengembangan kurikulum dengan memperhatikan kurikulum nasional yang telah ditetapkan, langkah untuk menyampaikannya di dalam proses pembelajaran dan siapa yang akan menyampaikannya [3)]. Pendidikan ini menuntut adanya perubahan sikap dan tingkah laku seluruh komponen sekolah; kepala sekolah, guru dan tenaga/staf administrasi termasuk orang tua dan masyarakat dalam memandang, memahami, membantu sekaligus sebagai pemantau yang melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan sekolah yang bersangkutan dengan didukung oleh pengelolaan sistem informasi yang repsentatif dan valid. Akhir dari semua itu ditujukan kepada keberhasilan sekolah untuk menyiapkan pendidikan yang berkualitas/bermutu bagi masyarakat [4)].

Metodologi

Metodologi dalam kajian ini adalah deskriptif dengan mengambil lokasi perpustakaan dan mengacu beberapa referensi terutama informasi dari Koran sebagai sumber data terutama Koran Sindo dengaqn menggunakan teknik snowballing. Artinya mengumpul informasi sebanyak mungkin tentang sekolah gratis lewat referensi dan Koran selama tahun 2009.

Hasil

Mengacu pada permasalaahn penelitian maka dapat ditemukan sebagai berikut : Pilar pertama adalah input , Hanya bebrapa sekolah unggulan disetiap kabupaten yang sudah memperhatikan mutu input. Dan sisasnya focus padaq kuantitas. Terutma sekoalah swasta yang baru berdiri. *Input* perangkat lunak meliputi struktur organisasi sekolah, peraturan perundangundangan deskripsi tugas, rencana, program, dsb. *Input* harapan-harapan berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran- sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah. Kesiapan *input* sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, tinggi rendahnya mutu *input* dapat diukur dari tingkat kesiapan *input*. Makin tinggi tingkat kesiapan *input*, makin tinggi pula mutu input tersebut. Input pendidikan

adalah siswa yang perlu diperhatikan mutunya terutama pada saat merekrut para siswa,sebaiknya memasang standar yang tinggi artinya nilai atau Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut *input* sedangkan sesuatu dari hasil proses disebut *produk.* Dalam pendidikan bersekala mikro (ditingkat sekolah), proses yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses yang dimaksud adalah proses pengembilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, dan proses monitoring dan evaluasi, dengan catatan bahwa proses belajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibanding dengan proses- proses lainnya.

Pilar kedua yaitu **proses** dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan dilakukan secara harmonis, sehingganya mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan *(enjoyable learning)*, mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik. Kata memberdayakan mengandung arti bahwa peserta didik tidak sekadar menguasai pengetahuan yang diajarkan oleh gurunya, akan tetapi pengetahuan tersebut juga telah menjadi muatan nurani peserta didik, dihayati, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan lebih penting lagi peserta didik tersebut mampu belajar secara terus menerus (mampu mengembangkan dirinya).

Pilar yang ketiga produk pendidikan merupakan kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses/perilaku sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, efesiesinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya dan moral kerjanya. Khusus yang berkaitan dengan mutu *produk* sekolah, dapat dijelaskan bahwa *produk* sekolah dikatakan berkualitas/bermutu tinggi jika prestasi sekolah, khusunya prestasi belajar siswa, menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam : (1) prestasi akademik, berupa nilai ulangan umum EBTA, EBTANAS, sekarang dinamakan UN, karya ilmiah, lomba akademik, dan (2) prestasi non-akademik, seperti misalnya IMTAQ, kejujuran, kesopanan, olah raga, kesenian, keterampilan kejujuran, dan kegiatan-kegiatan ektsrakurikuler lainnya. Mutu sekolah dipengaruhi oleh banyak tahapan kegiatan yang saling berhubungan (proses) seperti misalnya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia dimana berbagai permasalahan hanya dapat dipecahkan kecuali dengan upaya penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain

manfaat bagi kehidupan manusia di satu sisi perubahan tersebut juga telah membawa manusia ke dalam era persaingan global yang semakin ketat. Agar mampu berperan dalam persaingan global, maka sebagai bangsa kita perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif dan efisien dalam proses pembangunan, kalau tidak ingin bangsa ini kalah bersaing dalam menjalani era globalisasi tersebut. Ada dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Pertama strategipembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat *input oriented.* Strategi yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan (sekolah) akan dapat menghasilkan produk (keluaran) yang bermutu sebagai mana yang diharapkan. Ternyata strategi input-produk yang diperkenalkan oleh teori education production function tidak berfungsi sepenuhnya di lembaga pendidikan (sekolah), melainkan hanya terjadi dalam institusi ekonomi dan industri.

Pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat *macro-oriented,*diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak factor yang diproyeksikan di tingkat makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolah). Atau dengan singkat dapat dikatakan bahwa komleksitasnya cakupan permasalahan pendidikan, seringkali tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat.

Pilar yang keempat adalah *organisasi* peningkatan mutu berbasis sekolah ini ditulis dengantujuan;

a. Mensosialisasikan konsep dasar 5 pilar manajemen mutu terpadu berbasis sekolah khususnya kepada masyarakat.
b. Memperoleh masukan agar konsep manajemen ini dapat, diimplentasikan dengan mudah dan sesuai dengan kondisi lingkungan Indonesia yang memiliki keragaman kultural, sosioekonomi masyarakat dan kompleksitas geografisnya.
c. Menambah wawasan pengetahuan masyarakat khususnya masyarakat sekolah dan individu yang peduli terhadap pendidikan, khususnya peningkatan mutu pendidikan.
d. Memotivasi masyarakat sekolah untuk terlibat dan berpikir mengenai,

peningkatan mutu pendidikan/pada sekolah masing - masing.

e. Menggalang kesadaran masyarakat sekolah untuk ikut serta secara, aktif dan dinamis dalam mensukseskan peningkatan mutu pendidikan,
f. Memotivasi timbulnya pemikiran - pemikiran baru dalam mensukseskan pembangunan pendidikan dari individu dan masyarakat sekolah yang berada di garis paling depan dalam proses pembangunan tersebut.,
g. Menggalang kesadaran bahwa peningkatan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab semua komponen masyarakat, dengan fokus peningkatan mutu yang berkelanjutan (terus menerus) pada tataran sekolah.
h. Mempertajam wawasan bahwa mutu pendidikan pada tiap sekolah harus dirumuskan dengan jelas dan dengan target mutu yang harus dicapai setiap tahun. 5 tahun,dst,sehingga tercapai misi sekolah kedepan.

Beberapa indikator yang menunjukkan karakter dari konsep manajemen dan organisasi sekolah ini antara lain sebagai berikut:

a. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib,
b. Sekolah memilki misi dan target mutu yang ingin dicapai,
c. Sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat,
d. Adanya harapan yang tinggi dari personel sekolah (kepala sekolah, guru, dan staf aspek akademik dan administratif, dan pemanfaatan hasilnyauntuk penyempurnaan /perbaikan mutu.
e. Adanya komunikasi dan dukungan intensif dari orang tua murid/masyarakat.

Pliar yang kelima adalah *komitment* dalam hal ini komitmen merupakan janji pemimpin tentang sekolah gratis. Nampaknya komitmen dsudah dimulai dari atas, namun belum sepenuhnya diikuti oleh para kepala sekolah dan tentunya para guru sebagai pendidikan yang bermutu.

PEMBAHASAN

Seiring dengan permasalah artikel ini : Bagaimana *input, proses, dan produk pendidikan* , komitment, organisasi pendidikan gratis di Sum-Sel?. Maka akan dibahas satu persatu tentang 5 pilar TQM.

Dalam kaitannya dengan pilar pertama yaitu *input pendidikan* a.l; siswa bahwa hanya bebrapa sekolah baik negeri ataupun swasta yang meperhatikan input mutu , terutama sekolah-sekoah unggulaqn disetiap kabupaten yang sudah memperhatikan *input mutu* dan sisanya focus pada kuantitas saja.

Pilar kedua yaitu *proses* dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan dilakukan secara harmonis, sehingganya mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan *(**enjoyable learning**)*, mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik. Kata memberdayakan mengandung arti bahwa peserta didik tidak sekadar menguasai pengetahuan yang diajarkan oleh gurunya, akan tetapi pengetahuan tersebut juga telah menjadi muatan nurani peserta didik, dihayati, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan lebih penting lagi peserta didik tersebut mampu belajar secara terus menerus (mampu mengembangkan dirinya). Seiring dengan itu juga sebaiknya pendidik menggunakan strategi pengajar yang sesuai dengan konteksnya terutama menggunakan strategi kognitif dan strategi metakognitif termasuk strategi social dan strategi afektif, sehingga pembelajar tidak merasa jenuh dalam belajar. [5)]

Pilar yang ketiga ***Produk pendidikan*** merupakan kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses/perilaku sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, efesiesinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya dan moral kerjanya. Khusus yang berkaitan dengan mutu *produk* sekolah, dapat dijelaskan bahwa *produk* sekolah dikatakan berkualitas/bermutu tinggi jika prestasi sekolah, khusunya prestasi belajar siswa, menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam : (1) prestasi akademik, berupa nilai ulangan umum EBTA, EBTANAS, sekarang dinamakan UN, karya ilmiah, lomba akademik, dan (2) prestasi non-akademik, seperti misalnya IMTAQ, kejujuran, kesopanan, olah raga, kesenian, keterampilan kejujuran, dan kegiatan-kegiatan ektsrakurikuler lainnya.

Dari penjelasan diatas dapat dikomentari bahwa perlu adanya peningkatan nilai-rata-rata NEM atau passing grade perlu ditingkatkan terus menerus dari angka 6 menjadi angka 8 atau lebih sehingga sesuai dengan niat dari kurikulum berbasis kompetensi yang memerlukan standar nilai yang tinggi.

Pilar yang keempat adalah *organisasi* peningkatan mutu berbasis sekolah ini ditulis dengan tujuan;

a. Mensosialisasikan konsep dasar 5 pilar manajemen mutu terpadu berbasis sekolah khususnya kepada masyarakat.
b. Memperoleh masukan agar konsep manajemen ini dapat, diimplentasikan dengan mudah dan sesuai dengan kondisilingkungan Indonesia yang memiliki keragaman kultural, sosioekonomi masyarakat dan kompleksitas geografisnya.

c. Menambah wawasan pengetahuan masyarakat khususnyamasyarakat sekolah dan individu yang peduli terhadap pendidikan, khususnya peningkatan mutu pendidikan.
d. Memotivasi masyarakat sekolah untuk terlibat dan berpikir mengenai, peningkatan mutu pendidikan/pada sekolah masing - masing.
e. Menggalang kesadaran masyarakat sekolah untuk ikut serta secara, aktif dan dinamis dalam mensukseskan peningkatan mutu pendidikan,
f. Memotivasi timbulnya pemikiran - pemikiran baru dalam mensukseskan pembangunan pendidikan dari individu.

Sejalan dengan penjelasan diatas perlu untuk merubah gaya kepeminpinan organisasi pendidikan yang berorientasi pada sekolah tidak berorientasi pada kebijakan pusat semata-mata sehingga sekolah mempunyai wewenang dalam mengatur kurikulum serta proses belajar dan mengajar yang bermutu tinggi.

Pilar yang kelima adalah *komitment* dalam hal ini komitmen merupakan janji pemimpin tentang sekolah gratis. Nampaknya komitmen sudah dimulai dari atas, namun belumsepenuhnya diikuti oleh para kepalasekolah dan tentunya para guru sebagai pendidikan. Sesuai dengan visi dan misi serta program pembelajaran yang bermutu. Serta berjanji untuk mengimplementasikan

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas tentang pendidikan gratis berbasis 5 pilar manajemen mutu terpadu. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan tentang pendidikan gratis berbasis 5 pilar manajemen mutu terpadu yang meliputi : *input, proses, dan outcome atau produk pendidikan* , komitment, organisasi. Sekurang-kurang ada tiga hal yang harus dicakup dalam system penjaminan mutu. Pertama system penjaminanmutu internal yqng dilaksanakan oleh sekolah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan, kedua system penjaminan mutu eksternal dalam hal ini dilakukan oleh pihak diknas, dan masyarakat serta sekolah harus memiliki **pangkalan data** sehingga terciptanya transparency dan akuntabilitas sekolah. Disarankan untuk melaksanakan 5 pilar TQM atau penjaminan mutu terpadu. Disarankan juga agar dana sekolah gratis perlu ditingkatkan lagi dari tahun ketahun secara berkesinambungan supaya mutu pendidikan dapat berjalan sebagaimana semustinya

DAFTAR PUSTAKA

1. Creech, Bill, Lima Pilar Manajemen Mutu Terpadu. Binarupa Aksara Jakarta: 1987

2. Tim Teknis Bappenas, School-Based Management di Tingkat Pendidikan Dasar, Naskah kerjasama Bappenas dan Bank Dunia, Jakarta: 1999,

3. Dikmenum, Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah: Suatu Konsepsi Otonomi Sekolah (paper kerja), Depdikbud,Jakarta. 1999

4. Suseno, Muchlas, , Percepatan Pembelajaran Menjelang Abad 21 (makalah hasil analisis dari Accelerated Learning for 21st Century oleh Colin Rose and Malcolm J. Nicholl), Pasca Sarjana IKIP Jakarta, Jakarta: 1998

5. Rebecca.L.Oxford. Language Learning Strategies. University of Alabama Press, Boston: 1990.